



EVALUASI EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENGENDALIAN INFLASI: ANALISIS MENGGUNAKAN *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)*

*Marsandhi Evan Dino Pardede¹

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Padang

*Alamat Korespondensi: marsandhi.evan@kemenkeu.go.id

Abstract

This study shifts the focus from examining inflation and its determinants, as emphasized in prior research, to evaluating the efficiency of inflation control budget utilization at the ministry/agency level. It employs Data Envelopment Analysis (DEA) as an alternative to the ordinary least squares (OLS) approach commonly used in earlier studies, enabling more comprehensive efficiency evaluation. Inflation is a key macroeconomic indicator that must be maintained at a low and stable level because it directly affects purchasing power and economic stability. To achieve this objective, the Government, through the Ministry of Finance, allocates an inflation control budget within the State Budget (APBN), which is distributed to all provinces, including West Sumatra Province. However, the increase in the inflation control budget in West Sumatra has not been accompanied by improved inflation performance, as inflation has exceeded the national level, indicating potential inefficiencies in budget utilization. This study aims to analyze the efficiency of inflation control budget utilization by ministries/agencies and activities up to the third quarter of 2024 using Data Envelopment Analysis (DEA). The results indicate inefficiencies in several inflation control activities conducted in February, May, July, and September by Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the Ministry of Public Works and Housing, the Ministry of Transportation, and the Ministry of Agriculture. Therefore, it is recommended that the relevant ministries/agencies focus evaluation and optimization efforts on the inefficient activities to improve budget efficiency and enhance inflation control effectiveness going forward.

Keywords: *Inflation; Inflation Control Budget; DEA; Efficiency; Output*

Abstrak

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada inflasi dan determinannya, penelitian ini mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran pengendalian inflasi pada tingkat kementerian/lembaga. Penggunaan metode Data Envelopment Analysis (DEA) menjadi alternatif atas pendekatan ordinary least squares (OLS) yang umum digunakan dalam studi sebelumnya untuk memperoleh hasil pengukuran efisiensi yang lebih



komprehensif. Inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil karena berdampak langsung pada daya beli dan stabilitas ekonomi. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi dalam APBN yang disalurkan ke seluruh provinsi, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Namun, peningkatan anggaran tersebut tidak diikuti oleh perbaikan kinerja inflasi, yang justru melampaui tingkat nasional, sehingga mengindikasikan adanya inefisiensi penggunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi penggunaan anggaran pengendalian inflasi menurut kementerian/lembaga dan kegiatan hingga triwulan III tahun 2024 dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil analisis menunjukkan adanya kegiatan pengendalian inflasi yang tidak efisien pada bulan Februari, Mei, Juli, dan September pada BPS, KKP, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, direkomendasikan agar kementerian/lembaga terkait memfokuskan evaluasi dan optimalisasi pada kegiatan yang terdeteksi tidak efisien agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan pengendalian inflasi menjadi lebih efektif ke depan.

Kata Kunci: Inflasi; Anggaran Pengendalian Inflasi; DEA; Efisiensi; Kegiatan; *Output*

JEL Classification: H590, E63, H83

PENDAHULUAN

Masalah kenaikan harga barang maupun jasa (inflasi) menjadi masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Konsumen maupun produsen menjadi resah karena naiknya harga barang maupun jasa akan dapat menurunkan daya beli konsumen yang tentunya akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pendapatan kecil. Masalah inflasi ini juga berdampak bagi produsen karena dengan tingginya inflasi, daya beli konsumen akan berkurang yang menyebabkan banyak barang dan jasa yang tidak laku terjual. Hal ini membuat produsen tidak dapat berinvestasi pada produk buatannya dan tidak dapat mengembangkan usahanya. Jika masalah inflasi ini membuat tingkat konsumsi konsumen dan tingkat investasi produsen mengalami penurunan, terlebih lagi jika terjadi

secara terus menerus, maka akan membuat pendapatan nasional mengalami penurunan dengan asumsi *ceteris paribus* (Suryani et al., 2022). Jika pendapatan nasional mengalami penurunan, maka masalah-masalah makro akan terjadi seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ketidakstabilan sektor-sektor keuangan, menurunnya tingkat penyaluran kredit, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi dalam APBN guna mengendalikan harga-harga, menjaga daya beli masyarakat, serta mengakselerasi perekonomian. Anggaran pengendalian inflasi ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu fungsi APBN, yaitu fungsi stabilisasi perekonomian negara Indonesia.

Inflasi (yoy) Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I dan II tahun 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan paling tinggi dibandingkan inflasi seluruh provinsi di Pulau

Tabel 1 Inflasi per Provinsi Pulau Sumatera					
Provinsi	Triwulan I 2024	Triwulan II 2024	Triwulan III 2024		
	Inflasi (yoy)	Inflasi (yoy)	Inflasi (yoy)	Inflasi (yoy)	Target
Aceh	3,25	3,09	1,50	1,31	2,5 ± 1%
Sumatera Utara	3,67	3,35	1,40	0,46	
Sumatera Barat	3,93	4,04	1,52	0,15	
Riau	3,57	3,56	1,38	0,13	
Jambi	3,84	3,34	1,95	0,39	
Sumatera Selatan	3,24	2,48	1,40	0,04	
Bengkulu	3,56	3,64	1,48	0,38	
Lampung	3,45	2,84	2,16	0,48	
Kepulauan Bangka Belitung	1,80	1,08	0,49	0,28	
Kepulauan Riau	3,37	3,54	2,53	1,11	

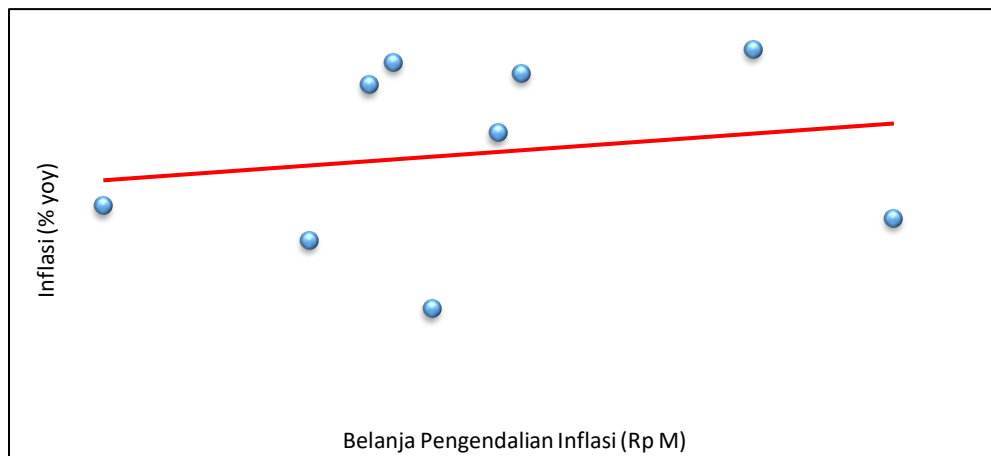
Sumber: BPS, 2024

Sumatera. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1, inflasi Provinsi Sumatera Barat pada akhir triwulan I dan II 2024 masing-masing tercatat sebesar 3,93% dan 4,04%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional dan paling tinggi jika dibandingkan dengan inflasi seluruh provinsi di regional Pulau Sumatera. Pada akhir triwulan III 2024, inflasi di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 1,52%. Nilai tersebut turun dibandingkan akhir triwulan sebelumnya dan tertinggi ke 4 dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Namun, pada akhir triwulan III 2024 ini, inflasi (ytd) tercatat sebesar 0,15%. Nilai tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), sebesar 2,5±1%. Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi guna menekan angka inflasi dan membuatnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh BI.

Optimalisasi kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi

Sumatera Barat memerlukan anggaran agar kegiatan tersebut dapat terealisasi. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBN dan dimasukkan ke dalam anggaran pengendalian inflasi. Gambar 1 menyajikan *scatter plot* antara anggaran pengendalian inflasi (Rp M) dengan inflasi (% yoy) di Provinsi Sumatera Barat. Tren anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan, namun inflasi di Provinsi ini tercatat juga ikut mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada garis *trend* (warna merah) pada Gambar 1 yang memiliki arah positif. Seharusnya, ketika belanja anggaran pengendalian inflasi ditambah, maka angka inflasi cenderung akan rendah atau stabil. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa terdapat inefisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk mengendalikan inflasi di Sumatera Barat sampai akhir triwulan III 2024, sehingga angka inflasi di Sumatera Barat masih tertinggi jika

Gambar 1 *Scatter Plot* Anggaran Pengendalian Inflasi dan Inflasi (yoy) Sumatera Barat sampai dengan TW III 2024



Sumber: BPS dan Sintesa, 2024

dibandingkan angka inflasi provinsi lain di Pulau Sumatera dan belum mencapai target yang ditetapkan oleh BI.

Telah banyak penelitian yang membahas inflasi beserta determinannya, namun peneliti belum menemukan penelitian yang meneliti efisiensi penggunaan anggaran pengendalian inflasi terhadap inflasi sampai tingkat Kementerian/Lembaga dan kegiatan, khususnya lokus penelitian di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian terdahulu menggunakan regresi *ordinary least square* (OLS) dilakukan oleh Suryani et al. (2022), Ningsih & Kristiyanti (2018), dan Beureukat (2022). Di sisi lain, metode OLS ini tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi (Coelli et al., 2005). Metode untuk menghitung tingkat efisiensi adalah *data envelopment analysis* (DEA). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik DEA untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran pengendalian inflasi dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Barat, baik menurut

Kementerian/Lembaga dan kegiatan sampai triwulan III tahun 2024.

Walaupun peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang mengkaji terkait efisiensi belanja anggaran pengendalian inflasi terhadap inflasi, namun banyak penelitian serupa yang menggunakan DEA untuk mengukur tingkat efisiensi kebijakan pemerintah dalam berbagai sektor. Lino et al. (2025) menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan DEA. Penelitian terdahulu yang mengkaji efisiensi anggaran pemerintah adalah penelitian dari Maududy et al. (2018) yang membahas efisiensi anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap indikator pendidikan di Indonesia menggunakan DEA dan penelitian dari Rambe (2020) yang membahas inefisiensi belanja pemerintah daerah di Indonesia yang juga menggunakan DEA. Penelitian lainnya dari Srithongrungrong-Kriz (2025), Yusefany (2015), Krejnu et al. (2023), serta Afonso et al. (2024) yang juga membahas efisiensi anggaran

pemerintah. Dengan demikian, kajian tingkat efisiensi penggunaan anggaran pengendalian inflasi menggunakan DEA ini dapat memberikan perspektif baru bagi pengelola anggaran agar target pengendalian inflasi yang stabil dapat tercapai.

TINJAUAN LITERATUR

Sistem Rujukan Statistik (Sirusa) oleh BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi adalah kenaikan persentase harga (Mankiw, 2015). Naiknya harga barang dan jasa tersebut juga menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat diartikan sebagai turunnya nilai uang terhadap nilai barang maupun jasa secara umum.

Pujadi (2022) menyatakan bahwa inflasi yang merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum tidak berarti kenaikan satu atau dua macam barang/jasa, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang/jasa. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat didekomposisikan menjadi dua, yaitu inflasi permintaan yang disebabkan oleh naiknya permintaan secara agregat dan inflasi penawaran yang disebabkan oleh turunnya penawaran secara agregat.

Simon (2023) menyatakan bahwa inflasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu inflasi *core* dan *non-core*. Inflasi *core* adalah komponen inflasi yang cenderung persisten dan dipengaruhi oleh determinan yang fundamental, seperti interaksi *supply* dan *demand*, faktor eksternal, dan dugaan inflasi dari produsen dan konsumen. Inflasi *non-core* adalah inflasi yang dipengaruhi oleh komponen bergejolak dan

komponen harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Riyono et al. (2022) menyatakan bahwa inflasi, berdasarkan besarnya, dapat dibagi menjadi empat kriteria, yaitu inflasi ringan ($< 10\%$ setahun), inflasi sedang ($10\% - 30\%$ setahun), inflasi berat ($30\%-100\%$ setahun), dan hiperinflasi yaitu ketika inflasi $>100\%$ setahun.

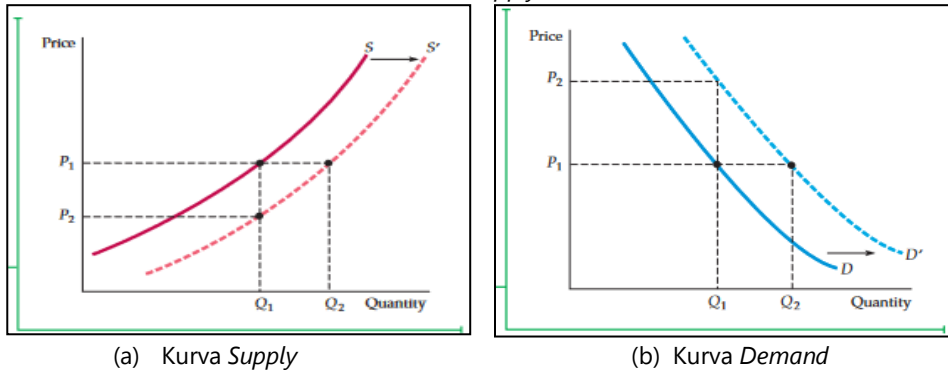
Ningsih & Kristiyanti (2018) menyatakan bahwa inflasi terjadi karena adanya kesenjangan antara *excess* permintaan agregat yang tidak mampu dipenuhi oleh penawaran agregat. Penyebab inflasi, jika dilihat dari perspektif *demand*, adalah tingginya permintaan masyarakat karena jumlah uang beredar yang meningkat.

Chandra & Wahyuningsih (2021) menyatakan bahwa inflasi merupakan naiknya harga barang maupun jasa yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga ini dapat dikatakan sebagai inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak hanya terjadi pada satu barang dan jasa saja, tapi mencakup kenaikan pada seluruh barang dan jasa secara umum.

Studi literatur ini juga memberikan informasi bahwa inflasi terjadi karena adalah *inflationary gap*, yaitu ketika permintaan lebih besar dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Tingginya *demand* yang tidak dibarengi oleh *supply* yang tersedia, membuat harga naik dan terjadi inflasi.

Inflasi dibagi menjadi dua, yaitu *demand pull inflation* dan *cost push inflation*. *Demand pull inflation* adalah inflasi yang terjadi karena naiknya permintaan masyarakat sedangkan *cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi.

Gambar 2 Kurva Supply dan Demand



Sumber: Pindyck & Rubinfeld (2013)

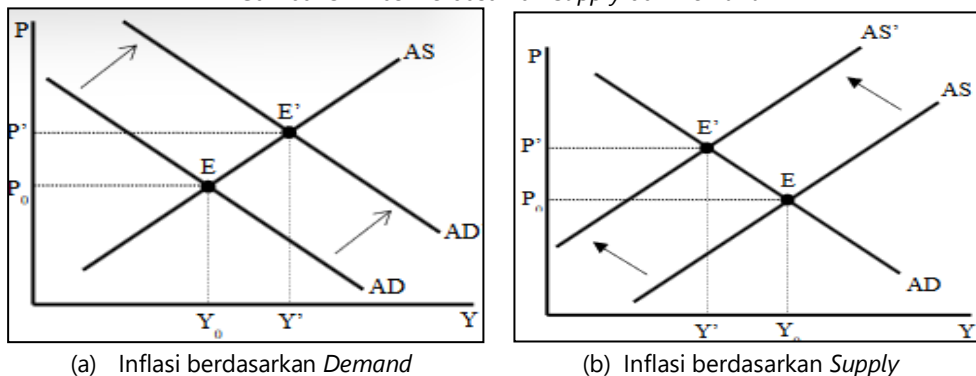
Studi literatur ini juga memberikan informasi bahwa ketika terjadi inflasi, nilai barang dan jasa serta daya beli masyarakat akan turun. Oleh karena itu, inflasi diusahakan selalu stabil agar tidak memberikan dampak ketidakstabilan ekonomi suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

Pindyck & Rubinfeld (2013) menyatakan bahwa kurva *supply* dan *demand* berhubungan dengan harga barang/jasa (Gambar 2). Kurva *supply* menunjukkan relasi antara jumlah barang yang diproduksi produsen pada harga tertentu, sedangkan kurva *demand* menunjukkan relasi antara

jumlah barang yang di konsumsi konsumen pada harga tertentu.

Pujadi (2022) menjelaskan interaksi antara kurva *demand* dan *supply* terhadap tingkat perubahan harga (inflasi). Inflasi menurut permintaan disebabkan oleh meningkatnya tarikan permintaan (*demand pull inflation*), diilustrasikan pada Gambar 3 bagian (a). Titik *equilibrium* awalnya berada pada titik E, namun karena adanya peningkatan *demand* menyebabkan kurva AD *shifting* ke kanan dan membentuk titik *equilibrium* E'. Titik *equilibrium* ini memberikan informasi bahwa *output* mengalami kenaikan dari Y_0 menjadi Y' dan harga mengalami

Gambar 3 Inflasi Berdasarkan Supply dan Demand



Sumber: Pindyck & Rubinfeld (2013)

kenaikan dari P_0 menjadi P' . Pada kasus inflasi ini, naiknya permintaan akan menyebabkan naiknya harga (P) dan *output* (Y).

Inflasi menurut penawaran disebabkan oleh menurunnya penawaran akibat naiknya dorongan biaya. Ilustrasinya terdapat pada Gambar 3 bagian (b). Awalnya titik *equilibrium* berada pada titik E. Naiknya biaya produksi menyebabkan penawaran *shifting* ke kiri dan menciptakan titik *equilibrium* yang baru di titik E'. Titik *equilibrium* yang baru ini memberikan informasi bahwa harga mengalami kenaikan dari P_0 menjadi P' namun *output* mengalami penurunan dari Y_0 menjadi Y' . Pada kasus inflasi ini, dorongan biaya menyebabkan naiknya harga (P) dan turunnya *output* (Y).

Mankiw (2015) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tingkat suku bunga dengan inflasi). Persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\pi = i - r \quad \dots (1)$$

dimana π adalah inflasi, i adalah suku bunga nominal, dan r adalah suku bunga real.

Penjelasan terkait persamaan (1) merujuk pada Suryani et al. (2022) yang menyatakan bahwa terdapat relasi antara harga dengan investasi. Naiknya suku bunga akan mengurangi jumlah *money abroad* sehingga harga-harga akan turun. Sebaliknya, turunnya suku bunga akan menyebabkan *money abroad* akan naik sehingga harga-harga akan naik.

Beureukat (2022) menyatakan bahwa suku bunga merupakan faktor pendorong yang kuat timbulnya inflasi. Penelitian ini juga menjelaskan naiknya suku bunga menyebabkan turunnya

daya beli masyarakat dan turunnya inflasi pendorong yang kuat timbulnya inflasi. Penelitian ini juga menjelaskan naiknya suku bunga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan turunnya inflasi.

Ningsih & Kristiyanti (2018) menyatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan BI dalam menangani inflasi adalah menggunakan suku bunga. BI akan langsung menaikkan suku bunga ketika inflasi tercatat cukup tinggi guna meredam inflasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara suku bunga dengan inflasi, sehingga hasil penelitiannya sesuai dengan teori.

Penelitian Sriwahyuni et al. (2020) menyatakan bahwa terdapat relasi antara suku bunga dan inflasi. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa tingkat suku bunga riil merupakan hasil pengurangan antara tingkat bunga nominal dengan inflasi, sehingga diketahui bahwa ketika suku bunga dinaikkan, maka angka inflasi akan turun.

Menurut Mankiw (2015), rumus *Keynesian Cross* dan IS-LM adalah:

$$Y = PE \quad \dots (2)$$

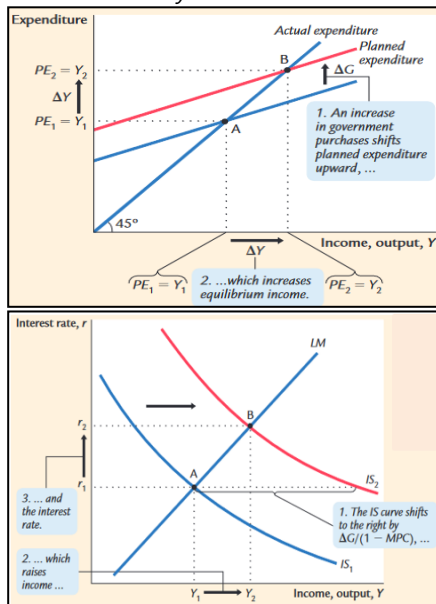
$$PE = C + I + G \quad \dots (3)$$

$$IS : Y = C(Y_d) + I(r) + G \quad \dots (4)$$

$$LM : (M/P)^d = L(r, Y) \quad \dots (5)$$

Hasil literatur sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4 menjelaskan bahwa ketika terjadi kebijakan fiskal ekspansif berupa peningkatan pengeluaran pemerintah dalam hal pengendalian inflasi, maka kurva *planned expenditure* pada persamaan (2) akan bergerak naik ke atas sehingga *output* akan naik dari Y_1

Gambar 4 Keynesian Cross & IS-LM



Sumber: Pindyck & Rubinfeld (2013)

menjadi Y_2 . Naiknya kurva *planned expenditure* menyebabkan kurva IS pada persamaan (4) bergeser ke kanan dari IS_1 ke IS_2 dengan kurva LM pada persamaan (5) tidak berubah. Bergesernya kurva IS ini menyebabkan tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan yang awalnya r_1 menjadi r_2 . Sesuai dengan persamaan (1), naiknya tingkat suku bunga (r) akan menyebabkan tingkat inflasi turun. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa teori suku bunga, *Keynesian Cross*, dan IS-LM dapat menjelaskan naiknya pengeluaran pemerintah berupa anggaran pengendalian inflasi mampu menurunkan tingkat inflasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kerangka berpikir sebagaimana yang dituangkan pada Gambar 5.

Penelitian Drebee & Razak (2018) menyatakan bahwa DEA adalah teknik nonlinear yang mengaplikasikan konsep pemrograman linear untuk

Gambar 5 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah peneliti

mengevaluasi tingkat efisiensi dari keputusan yang dibuat oleh unit observasi. Konsep dari DEA ini mengadaptasi dari optimalitas Pareto, yaitu berusaha meminimalkan *input* dengan tetap mempertahankan *output*nya. Asumsi dalam teknik DEA ini adalah *constant return to scale* (CRS) yang artinya persentase naiknya *input* akan *equal* dengan persentase naiknya *output*.

DEA dibentuk berdasarkan *input oriented* yaitu berusaha meminimalkan *input* dengan tetap mempertahankan *output*. Menurut Drebee & Razak (2018), rumus dari DEA *input oriented* adalah sebagai berikut.

Max. ϕ

s.t.

$$\sum_{j=1}^t \lambda_j x_{ij} - \phi x_{i j_0} \leq 0; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, t$$

$$\sum_{j=1}^t \lambda_j x_{rj} - \phi x_{i j_0} \leq 0; r = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, t$$

$$\lambda_j \geq 0; j = 1, 2, \dots, t$$

dimana ϕ adalah derajat efisiensi, m adalah banyaknya output, n adalah banyaknya input, t adalah banyaknya unit observasi, λ_j adalah pembobot pada input dan output unit observasi ke j , y_{rj} adalah jumlah output r yang dibutuhkan unit observasi untuk mengukur efisiensi, dan $x_{i j_0}$ adalah jumlah input i yang dibutuhkan oleh unit observasi j_0 untuk mengukur efisiensi.

Farida & Azhari (2018) menyatakan bahwa DEA adalah *tools* analisis untuk menganalisis kinerja suatu aktivitas dalam unit entitas. Analisis DEA ini merupakan metode non parametrik pengembangan dari matematika *linear programming*. Kelebihan DEA ini adalah mampu mengidentifikasi *input* dan *output* suatu entitas serta mampu mencari penyebab dan jalan keluar dari inefisiensi suatu unit entitas.

Menurut BPS (2019), terdapat tiga kriteria tingkat efisiensi, yaitu tidak efisien (<50%), cukup (50%-75%), dan sangat efisien (>75%). Analisis DEA memiliki keterbatasan yaitu mensyaratkan *input* dan *output* harus spesifik dan terukur, setiap unit input dan *output* identik dengan unit lain dalam tipe yang sama, DEA mengasumsikan CRS, dan bobot *input* dan *output* pada DEA tidak dapat diinterpretasikan dalam nilai ekonomi.

Penelitian Susilawati & Utami (2021) menyatakan bahwa DEA merupakan metode non parametrik yang menggunakan model program linear untuk menghitung perbandingan antara output dan input untuk semua unit. Metode DEA ini diukur dengan membandingkan input dan output, menggunakan sebuah titik pada garis *frontier*. Garis *frontier* ini merupakan hasil yang efisien. Ketika unit observasi berada pada garis ini, maka tingkat efisiensinya bernilai 1. Jika unit observasi berada dibawah garis *frontier*, maka unit tersebut memiliki efisiensi di bawah 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik. Teknik yang digunakan adalah teknik DEA untuk melihat tingkat

efisiensi anggaran pengendalian inflasi dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Barat.

Peneliti menggunakan bantuan *software* R-Studio untuk melakukan analisis DEA. Variabel terikat yang digunakan adalah inflasi (% yoy) dan variabel bebasnya adalah belanja APBN pengendalian inflasi, baik menurut K/L maupun kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh K/L itu sendiri.

Anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan tersebut dievaluasi efisiensinya menggunakan aplikasi DEA. Tahapannya adalah menghitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran tiap bulan, lalu menyajikan jumlah realisasi penggunaan anggaran yang tidak efisien menurut K/L sampai kegiatan pelaksanaannya dari bulan Januari sampai triwulan III 2024.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data inflasi (% yoy) yang bersumber dari BPS Provinsi Sumatera Barat dan data anggaran APBN pengendalian inflasi baik menurut K/L maupun kegiatan pelaksanaannya bersumber dari *website* Sintesa. Periode data yang dipakai adalah data bulanan sampai triwulan III 2024 mengingat pada tahun tersebut telah terjadi perubahan metodologi perhitungan inflasi, yang sebelumnya memakai dua kota pengukur inflasi, namun pada tahun 2024 memakai empat kabupaten/kota. Hal ini agar data yang digunakan dapat dibandingkan secara *apple to apple*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, disajikan tingkat efisiensi realisasi anggaran pengendalian inflasi dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Barat sampai triwulan III tahun

Tabel 2 Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi sampai TW III Tahun 2024

Bulan	Tingkat Efisiensi	Kategori
Januari	100%	Sangat Efisien
Februari	62,87%	Cukup Efisien
Maret	100%	Sangat Efisien
April	100%	Sangat Efisien
Mei	67,83%	Cukup Efisien
Juni	100%	Sangat Efisien
Juli	54,36%	Cukup Efisien
Agustus	100%	Sangat Efisien
September	27,34%	Tidak Efisien

Sumber: Diolah peneliti

2024. Hasil tingkat efisiensinya disajikan pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa penggunaan anggaran pengendalian inflasi dalam mengendalikan inflasi sampai September tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sangat efisien di bulan Januari, Maret, April, Juni, serta Agustus dengan tingkat efisiensi 100%. Pada bulan Februari, Mei, dan Juli tahun 2024 kategorinya cukup efisien dengan tingkat efisiensi antara 50%-75%, sedangkan pada bulan September 2024, masuk dalam kategori tidak efisien karena memiliki tingkat efisiensi dibawah 50%.

Hal ini menunjukkan bahwa sampai triwulan III tahun 2024 terdapat realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Barat, terutama pada bulan Februari, Mei, Juli, dan September 2024. Selanjutnya akan

disajikan total realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi Provinsi Sumatera Barat di masing-masing Kementerian/ Lembaga pada bulan Februari, Mei, Juli, dan Agustus tahun 2024. Hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa realisasi anggaran pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Barat yang tidak efisien yaitu pada bulan Februari 2024 sebesar Rp12,96 miliar, bulan Mei 2024 sebesar Rp20,48 miliar, bulan Juli 2024 sebesar Rp33,87 miliar, dan bulan September 2024 sebesar Rp17,25 miliar. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di bulan Februari 2024 pada BPS sebesar Rp131,33 juta, pada Kementerian PUPR sebesar Rp7,09 miliar, dan pada Kemenhub sebesar Rp5,73 miliar. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien

Tabel 3 Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi yang tidak efisien menurut K/L tahun 2024

Bulan	Februari	Mei	Juli	September
BPS	131,334,511	32,957,771	118,969,350	106,496,883
KKP	0	0	0	186,277,569
PUPR	7,097,214,867	13,071,860,999	28,534,710,551	6,516,212,212
KEMENHUB	5,731,726,223	7,377,563,413	5,222,695,614	10,006,168,665
KEMENTAN	0	0	0	436,905,000
TOTAL	12,960,275,601	20,482,382,183	33,876,375,515	17,252,060,329

Sumber: Diolah peneliti

dalam mengendalikan inflasi di bulan Mei 2024 pada BPS sebesar Rp32,95 juta, pada Kementerian PUPR sebesar Rp13,07 miliar, dan pada Kemenhub sebesar Rp7,37 miliar.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di bulan Juli 2024 pada BPS sebesar Rp118,96 juta, pada Kementerian PUPR sebesar Rp28,53 miliar, dan pada Kemenhub sebesar Rp5,22 miliar. Sedangkan realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di bulan September 2024 pada BPS sebesar Rp106,49 juta, pada KKP sebesar Rp186,28 juta, pada Kementerian PUPR sebesar Rp6,51 miliar, pada Kemenhub sebesar Rp10,01 miliar, dan pada Kementan sebesar Rp436,90 juta.

Setelah mengetahui total realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di masing-masing K/L, selanjutnya adalah menyajikan realisasi anggaran yang tidak efisien di tiap-tiap kegiatan. Hasilnya tersaji pada Tabel 4.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa pada bulan Februari 2024, realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di BPS terjadi pada kegiatan penyediaan dan pengembangan statistik harga sebesar Rp131,33 juta. Lalu realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kementerian PUPR terjadi pada kegiatan operasi pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana sebesar Rp2,12 miliar, lalu pada kegiatan pelaksanaan preservasi serta peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar Rp4,93 miliar, dan pada kegiatan penyediaan akses rumah layak huni sebesar Rp39,30 juta.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kemenhub terjadi pada kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp551,32 juta, kegiatan pelayanan transportasi darat sebesar Rp34,87 juta, kegiatan pelayanan transportasi laut sebesar Rp190,96 juta, dan pada kegiatan pelayanan transportasi perkeretaapian sebesar Rp4,95 miliar.

Pada Tabel 4 dapat terlihat juga bahwa pada bulan Mei 2024, realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di BPS terjadi pada kegiatan penyediaan dan pengembangan statistik harga sebesar Rp32,95 juta. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kementerian PUPR terjadi pada kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana sebesar Rp2,40 miliar, kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar Rp7,03 miliar, kegiatan pengembangan jaringan air tanah dan air baku sebesar Rp2,26 miliar, kegiatan pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non padi sebesar Rp283,07 juta, dan pada kegiatan penyediaan akses rumah layak huni sebesar Rp1,09 miliar. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp150,63 juta, kegiatan pelayanan transportasi darat sebesar Rp3,96 miliar, kegiatan pelayanan transportasi laut sebesar Rp391,99 juta, dan pada kegiatan pelayanan transportasi perkeretaapian sebesar Rp2,87 miliar.

Pada Tabel 4 dapat terlihat juga bahwa pada bulan Juli 2024, realisasi anggaran pengendalian inflasi yang

Tabel 4 Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi yang tidak efisien menurut K/L dan Kegiatan

K/L	Kegiatan	2024			
		Feb	May	Jul	Sep
BPS	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	131,334,511	32,957,771	118,969,350	106,496,883
KKP	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	0	0	0	186,277,569
PUPR	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	2,125,234,669	2,400,320,429	1,696,220,190	2,779,350,127
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	4,932,675,316	7,033,813,943	24,861,300,770	628,115,735
	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	0	2,264,511,000	1,534,740,944	1,327,841,386
	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi	0	283,077,806	104,434,381	1,756,579,640
	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	39,304,882	1,090,137,821	338,014,266	24,325,324
KEMEN HUB	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	551,319,823	150,631,836	679,716,336	746,501,875
	Pelayanan Transportasi Darat	34,877,000	3,962,777,780	22,286,029	1,089,880,786
	Pelayanan Transportasi Laut	190,965,463	391,991,718	303,851,351	2,203,442,236
	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	4,954,563,937	2,872,162,079	4,216,841,898	5,966,343,768
KEMEN TAN	Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal	0	0	0	436,905,000
	Tanaman Pangan				

Sumber: Diolah peneliti

tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di BPS terjadi pada kegiatan penyediaan dan pengembangan statistik harga sebesar Rp118,97 juta. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kementerian PUPR terjadi pada kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat

bencana sebesar Rp1,69 miliar, kegiatan pelaksanaan preservasi serta peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar Rp24,86 miliar, kegiatan pengembangan jaringan air tanah dan air baku sebesar Rp1,53 miliar, kegiatan pengembangan irigasi permukaan, rawa, serta non padi sebesar Rp104,43 juta, dan pada kegiatan penyediaan

akses rumah layak huni sebesar Rp338,01 miliar.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kemenhub terjadi pada kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp679,72 juta, kegiatan pelayanan transportasi darat sebesar Rp22,28 juta, kegiatan pelayanan transportasi laut sebesar Rp303,85 juta, dan pada kegiatan pelayanan transportasi perkeretaapian sebesar Rp4,21 miliar.

Pada Tabel 4 dapat terlihat juga bahwa pada bulan September 2024, realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di BPS terjadi pada kegiatan penyediaan dan pengembangan statistik harga sebesar Rp106,49 juta. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di KKP terjadi pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan sebesar Rp186,27 juta. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kementerian PUPR terjadi pada kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana sebesar Rp2,78 miliar, kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar Rp628,11 juta, kegiatan pengembangan jaringan air tanah dan air baku sebesar Rp1,32 miliar, kegiatan pengembangan irigasi permukaan, rawa, dan non padi sebesar Rp1,75 juta, dan pada kegiatan penyediaan akses rumah layak huni sebesar Rp24,32 juta. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kemenhub terjadi pada kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp746,50 juta, kegiatan pelayanan transportasi darat sebesar Rp1,08 miliar, kegiatan pelayanan

transportasi laut sebesar Rp2,20 miliar, dan pada kegiatan pelayanan transportasi perkeretaapian sebesar Rp5,96 miliar. Realisasi pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kementan terjadi pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serelia tanaman pangan sebesar Rp436,90 juta.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di BPS pada kegiatan penyediaan dan pengembangan statistik harga dapat dilakukan pengecekan pada publikasi/laporan statistik harga. Pendeteksian inefisiensi anggaran tersebut dapat diketahui apabila mengecek realisasi output pada publikasi/laporan statistik harga.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di KKP pada kegiatan pengelolaan pelabuhan dan perikanan dapat dilakukan pengecekan pada prasarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan. Pendeteksian inefisiensi anggaran tersebut dapat diketahui apabila mengecek pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di Kementerian PUPR pada kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana dapat dilakukan pengecekan pada output alat berat yang dioperasikan dan dipelihara, bangunan lahar dan pengendali sedimen yang dioperasikan dan dipelihara, bangunan pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara, irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara, kelembagaan yang difasilitasi, dan tanggap darurat bencana yang difasilitasi.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dapat dilakukan pengecekan pada output realisasi pembangunan jalan akses simpul transportasi. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada kegiatan pengembangan jaringan air tanah dan air baku dapat dilakukan pengecekan pada output jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada kegiatan pengembangan jaringan irigasi permukaan rawa dan non-padi dapat dilakukan pengecekan pada realisasi output jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun. Terakhir, realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada kegiatan penyediaan akses rumah layak huni dapat dilakukan pengecekan pada realisasi bantuan pembangunan rumah susun hunian MBR/pekerja.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi di Kemenhub pada kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat dapat dilakukan pengecekan pada realisasi output layanan angkutan jalan perintis, layanan angkutan multimoda, dan layanan angkutan penyeberangan perintis. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien kegiatan pelayanan transportasi darat dapat dilakukan pengecekan pada realisasi output peningkatan pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus Sumatera Barat. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada kegiatan layanan angkutan laut perintis prioritas nasional dapat dilakukan pengecekan pada

realisasi output layanan angkutan laut perintis prioritas nasional. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada kegiatan pelayanan transportasi perkeretaapian dapat dilakukan pengecekan pada realisasi output peningkatan jalur KA lintas Padang – Bukit Putus – Pauh Lima dan penyelenggaraan layanan KA lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien di Kementan pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serelia tanaman pangan dapat dilakukan pengecekan pada sarana pengembangan kawasan. Pendeteksian inefisiensi anggaran tersebut dapat diketahui apabila mengecek realisasi kawasan padi kaya gizi (biovertifikasi).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang bisa diambil adalah terdapat inefisiensi penggunaan anggaran pengendalian inflasi dalam mengendalikan inflasi sampai triwulan III tahun 2024 yaitu bulan Februari, Mei, Juli, dan September 2024. Pada bulan Februari terdapat realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien sebesar Rp12,96 miliar, bulan Mei sebesar Rp20,48 miliar, bulan Juli sebesar Rp33,88 miliar, dan bulan Agustus sebesar Rp17,25 miliar. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh pada berbagai program yang tidak efisien agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan inflasi dapat dikendalikan.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien tersebut terdapat pada realisasi BPS, KKP, Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Kementan. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi pada BPS

dapat dicek pada kegiatan kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga.

Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada KKP dapat dicek pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada Kementerian PUPR dapat dicek pada kegiatan operasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA serta penanggulangan darurat akibat bencana, kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, kegiatan pengembangan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi, dan pada kegiatan penyediaan akses rumah layak huni. Realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi pada Kemenhub dapat dicek pada realisasi kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat, kegiatan pelayanan transportasi darat, laut, dan perkeretaapian. Terakhir, realisasi anggaran pengendalian inflasi yang tidak efisien pada Kementan dapat dicek pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serelia tanaman pangan.

Rekomendasi yang bisa diberikan adalah pemerintah yang bersangkutan seperti BPS, KKP, Kementerian PUPR, Kemenhub, dan Kementan dapat lebih meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran pengendalian inflasi yang terdeteksi masih terdapat realisasi anggaran yang tidak efisien dalam mengendalikan inflasi kedepannya. Optimalisasi penggunaan anggaran di masing-masing K/L tersebut dapat difokuskan pada *output* dari kegiatan-kegiatan tersebut dengan harapan ke depannya anggaran yang digunakan dapat lebih efisien dan inflasi yang

terjadi dapat lebih stabil sehingga harga-harga barang dan jasa secara umum dapat lebih terkendali ke depannya.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi penelitian ini dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi pengelola keuangan, penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah. Dari sisi pengelola keuangan, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menilai kembali alokasi dana untuk pengendalian inflasi, serta mengevaluasi efisien atau tidaknya penggunaan dana yang ada untuk mencapai tujuan terkendalinya harga barang maupun jasa secara umum, karena efisiensi anggaran yang lebih baik akan meningkatkan daya serap anggaran dan mengurangi pemborosan. Dari sisi penyusunan anggaran, penelitian ini dapat mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap dinamika inflasi dalam hal pengaturan harga barang kebutuhan pokok, maupun penguatan kebijakan moneter. Lalu dari sisi evaluasi kinerja pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah inflasi dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

Afonso, A., Jalles, J. T., & Venâncio, A. (2024). A tale of government spending efficiency and trust in the state. *Public Choice*, 200(1–2), 89–118.

- <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01144-6>
- Beureukat. (2022). Pengaruh suku bunga terhadap inflasi di Indonesia. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 39–46. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1546>
- BPS. (2019). *Analisis Efisiensi Industri Manufaktur*.
- Chandra, E. K., & Wahyuningsih, D. (2021). Analisis pengaruh suku bunga, jumlah uang beredar dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia periode 2011-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1), 37–54.
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to efficiency and productivity analysis* (2nd ed.). Springer.
- Drebee, H. A., & Razak, N. A. A. (2018). Measuring the efficiency of colleges at the University of Al-Qadisiyah-Iraq: A data envelopment analysis approach. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 52(3), 163–179. <https://doi.org/10.17576/JEM-2018-5203-12>
- Farida, N., & Azhari, M. (2018). Pengukuran efisiensi menggunakan dea dan pengaruhnya terhadap stock return efficiency measurement using DEA and its effect towards stock return. *SIKAP*, 2(2), 112–121. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap>
- Krejnus, M., Stofkova, J., Stofkova, K. R., & Binasova, V. (2023). The use of the DEA method for measuring the efficiency of electronic public administration as part of the digitization of the economy and society. *Applied Sciences (Switzerland)*, 13(6), 1. <https://doi.org/10.3390/app13063672>
- Lino, C. N. Q., Apaza, R. R., & Espezua, M. del P. B. (2025). Efficiency of public spending at the municipal level: Evidence for the Peruvian case 2017–2023. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1614884>
- Mankiw, N. G. (2015). *Macroeconomics (8th ed)*. Worth Publishers.
- Maududy, I., Kebijakan, B., & Aulia, F. A. (2018). Efisiensi dana bos antarprovinsi di Indonesia: Apa yang memengaruhi? *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(3), 220–235.
- Ningsih, S., & Kristiyanti, L. (2018). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia periode 2014-2016. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 20(2), 96.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomics (8th ed.)*. Pearson.
- Pujadi, A. (2022). Inflasi: Teori dan kebijakan. *Jurnal Manajemen Diversitas*, 2(2), 73.
- Rambe, R. A. (2020). Inefisiensi belanja pemerintah daerah di Indonesia: Pendekatan DEA dan regresi logit. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(4), 311–324.
- Riyono, J., Pujiastuti, C. E., & Putri, A. L. R. (2022). Forecasting laju inflasi

- indonesia menggunakan rantai markov. *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jsms.v8i1.14767>
- Simon, F. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia (Studi pada masa pandemi Covid-19). *Scientific Journal of Reflection Economic Accounting Management and Business*, 6(1), 125–132.
- Srithongrungrong-Kriz, A. (2025). Measuring spending efficiency: An alternative performance metric for performance-based budgeting (PBB)? *Sustainable Development Research*, 7(4), p39. <https://doi.org/10.30560/sdr.v7n4.p39>
- Sriwahyuni, A., Nainggolan, P., & Sinurat, A. (2020). Pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga dan nilai tukar terhadap inflasi di Sumatera Utara. *Ekuilnomi: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 2614–7181. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.67>
- Suryani, G. C., Fevriera, S., & Adhitya, D. (2022). Determinan tingkat inflasi Indonesia tahun 1989-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 16–36. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i1.4714>
- Susilawati, D., & Utami, A. S. (2021). Data envelopment analysis (DEA): Efisiensi kinerja SD Muhammadiyah di Kabupaten dengan Akuntabilitas "A". *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 152–164. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.115>
- Yusfany, A. (2015). The efficiency of local governments and its influence factors. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 4(10), 219–241.